

**PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA
PEMILU KADA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

HUZAIFA KATARUDIN

NIM.16042058

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018

Nama : Huzaiifa Katarudin

NIM/TM : 16042058/2016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Juni 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing



Nora Eka Putri, S.IP., M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020 pukul 14.00-16.00 WIB

“Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018”

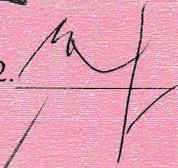
Nama : Huzaiifa Katarudin
NIM/TM : 16042058/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Juni 2020

Tim Penguji

	Nama
Ketua	Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
Anggota	Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Anggora	Lince Magriasti, S.IP, M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 


Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Huzaifa Katarudin
NIM/TM : 16042058/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018”** Adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apa bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Juni 2020

Saya yang menyatakan



HuzaiifaKatarudin

16042058/2016

ABSTRAK

Huzaifa Katarudin : Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018

Penelitian ini didasari oleh masih relatif rendahnya partisipasi pemilih pemula pada pemilu kada Kota Pariaman tahun 2018 yakni 20% dari jumlah pemilih pemula yang terdaftar sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Masih relatif tingginya tingkat apatisme pemilih pemula dan minim pengetahuan mengenai politik menjadikan pemilih pemula rentan untuk dimobilisasi, hal ini merupakan alasan bagi peneliti untuk menjadikan pemilih pemula sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu kada Kota Pariaman tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode survei. Adapun responden dalam penelitian adalah pemilih pemula yang memiliki usia rentan 17-23 tahun berdomisili di Kota Pariaman sebanyak 100 orang dengan tingkat kesalahan 10% serta diambil menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula memiliki nilai *Adjust R Square* 0.305 yang artinya pengaruh variabel literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula sebesar 31%. Dalam hal ini literasi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu kada Kota Pariaman.

Kata kunci : Literasi Politik, Sosialisasi Politik, Pemahaman Politik, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018”**

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian Proposal Penelitian ini :

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.si., Ph.D dan Ibuk Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

7. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Ali Umar dan Ibunda tersayang Maimuda yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Teruntuk sahabat – sahabat yang memberikan support, doa dan selalu membantu menyelesaikan Skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Desember 2019

Huzaifa Katarudin

DAFTAR ISI

	Halaman'
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Literasi Politik	10
2. Partisipasi Politik.....	14
3. Pemilih Pemula	26
4. Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik.....	27
5. Indikator Literasi Politik	28
6. Pemilihan Kepala Daerah.....	29
B. Studi Relevan	31
C. Kerangka Konseptual	33
D. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasional Variabel	36
D. Variabel Penelitian	39
E. Populasi dan Sampel Penelitian	39
1. Populasi	39

2. Sampel	40
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Jenis dan Pengumpulan Data	44
1. Jenis Data dan Sumber Data	45
2. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	45
1. Uji Validitas	45
2. Uji Reliabilitas	48
I. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	55
B. Profil Responden	59
C. Temuan Khusus	63
D. Pembahasan.....	81
E. Keterbatasan Penelitian.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Pariaman tahun 2008 - 2018	5
Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Kota Pariaman tahun 2018	6
Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang relevan	31
Tabel 3.1 Jumlah Populasi Pemilih Pemula	40
Tabel 3.2 Populasi Sampel Penelitian	42
Tabel 3.3 Skala Likert	43
Tabel 3.4 Klasifikasi TCR	43
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	43
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Politik	46
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Politik	47
Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Literasi Politik	48
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Politik	49
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	59
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	60
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	61
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Literasi Politik	63
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Literasi Politik	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	69
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	71

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	72
Tabel 4.12 Hasil Uji ANOVA Pengaruh Variabel Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	73
Tabel 4.13 Hasil Uji T Pengaruh Variabel; Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik	22
Gambar 3.1 Pengaruh antar Variabel Dalam Uji Regresi linier Sederhana.....	54
Gambar 4.1 Peta Kota Pariaman	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPU Kota Pariaman.....	59
Gambar 4.3 Persentase Responden berdasarkan Jenis Kelamin	61
Gambar 4.4 Persentase Responden menurut Klasifikasi Usia	62
Gambar 4.5 Persentase Responden menurut Pendidikan Terakhir	63
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada.....	66
Gambar 4.7 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada.....	68
Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik.....	69
Gambar 4.9 Laman Resmi KPU Kota Pariaman.....	76
Gambar 4.10 Laman Resmi Instagram KPU Kota Pariaman.....	77
Gambar 4.11 Laman Resmi Facebook KPU Kota Pariaman	77
Gambar 4.12 Laman Resmi Bawaslu Kota Pariaman	78
Gambar 4.13 Laman Resmi Facebook Bawaslu Kota Pariaman	78
Gambar 4.14 Laman Resmi Instagram Bawaslu Kota Pariaman.....	79
Gambar 4.15 Laman Resmi Facebook Genius Umar	80
Gambar 4.16 Laman Resmi Instagram Genius Umar	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu proses terpenting di kehidupan bernegara di Indonesia pada era reformasi yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sistem demokrasi yang digunakan pada penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu kada merupakan bentuk demokrasi yang tidak langsung (*indirect democracy*) yaitu pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah untuk menjadi wakil rakyat sehingga bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama. Dilaksanakannya pemilu kada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. (sutrisno, 2017)

Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memberikan suaranya untuk memilih pemimpin daerah berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“...Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Dalam Rangka kegiatan Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) ini diharapkan masyarakat bisa memberikan peranannya sebagai komponen terpenting dalam elemen sistem politik di Indonesia. Pemilu Kada merupakan sarana memilih pemimpin daerah yang bisa membawa daerahnya relatif baik

lagi kedepan dan mampu mencapai tujuan utama negara yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan itu negara harus mampu mengayomi masyarakatnya untuk terjun langsung ke dalam proses pelaksanaan Pemilu Kda karena aspek terpenting dalam tatanan negara itu sendiri yaitu Partisipasi politik masyarakat, hal ini disebabkan partisipasi politik memiliki pengaruh relatif besar dalam keberlangsungan jalannya sebuah roda pemerintahan, karena masyarakat mempunyai legitimasi dalam memilih pemimpin untuk memimpin pemerintahan. Ini bisa dikatakan bahwa partisipasi politik dalam pilkada merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap roda kepemimpinan untuk pemerintahan yang berikutnya agar tidak ada yang dirugikan atas keputusan dari pemerintah.

Partisipasi politik menurut P. Huntington dan Joan M Nelson (Budiarjo, 2012) menjelaskan arti partisipasi politik secara luas yakni kegiatan keluarga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat paham dan mengerti serta ikut serta dalam aktivitas kenegaraan. Sebaliknya rendah nya partisipasi politik secara umum mencerminkan bahwa rakyat tidak memberikan pemahaman dan hasrat pada permasalahan pada aktivitas kenegaraan. Sikap golongan putih (Golput) dalam pemilu merupakan

gambaran bagi rakyat yang tidak memilih. sehingga tingkat partisipasi politik menjadi sangat penting untuk ditilik karena rendah dan tingginya partisipasi politik menjadi indikator penting terhadap berjalannya proses demokrasi. Jadi dapat disimpulkan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kontestasi pemilihan umum yang terstruktur, partisipasi politik merupakan komponen utama agar bisa meningkatkan pemilihan umum yang memiliki partisipasi politik yang berkualitas dan berkuantitas. Tujuan dari partisipasi politik ini agar para pemilih bisa memahami dinamika-dinamika politik yang sedang terjadi dan sedang berkembang. Pemahaman tentang politik bagi partisipasi politik ini sangat penting karena Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk upaya dari berdemokrasi bagi kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab agar bisa melaksanakan tugas nya sebagai pelayan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan agar meningkatnya partisipasi politik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui literasi politik. Menurut Bernard Crick (Putri, 2015) mendefinisikan literasi politik adalah upaya menginterpretasikan konsepsi politik dari hal hal kecil seperti isu-isu politik, keyakinan para kontestan, serta bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain, secara sempitnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik. Dengan adanya literasi politik ini para pemilih pemula bisa mendapatkan pendidikan politik yang membantu para pemilih pemula untuk

bisa memahami konsep-konsep politik , aspek-aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum, dan alokasi harus di kuasai dan dipahami oleh pemilih karena ini merupakan aspek pokok agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Primandha Sukma Nur dan Wardhani (Wardhani Nur, 2018) menyatakan Pemilihan umum merupakan salah satu instrument demokrasi dari bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta bertanggung jawab untuk mensejahterahkan rakyat. Diantara pemilih terdapat kategori kelompok pemilih yang relatif menarik untuk dilihat dan diamati yakni pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan pemilih yang pertama kali memberikan pilihannya dalam pemilu.

Pemilih Pemula dalam Modul I Komisi Pemilihan Umum tahun 2013 kategori pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang perdana menggunakan hak pilih nya dalam aktivitas pemilu dan mereka yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Jadi dapat disimpulkan Pemilih pemula merupakan pemilih yang melakukan pemilu pertama kali dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Pemilih pemula sering kali mempunyai orientasi yang dinamis terhadap politik dan selalu berubah ubah ini disebabkan karena adanya indikator indikator yang mempengaruhi seperti lingkungan tempat tinggal, pendidikan, sosial budaya dan lain – lainnya. Sasaran utama dalam pesta demokrasi biasanya kaum pemilih pemula yang terdiri dari kalangan pelajar tingkat SMA/Sederajat dan mahasiswa di sekisaran umur 17 hingga 21 tahun. Jumlah pelajar dan

mahasiswa yang banyak dijadikan sasaran tepat bagi para calon pemimpin dan partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilihan. Jika pelajar dan mahasiswa ini tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang Politik tentu akan sangat mudah di pengaruhi.

Alasan penulis memilih studi di Kota Pariaman karena jumlah penduduknya relatif sedikit dibandingkan kota – kota lain serta jarak Kota Pariaman ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat jauh relatif dekat jadi tentunya pemahaman dan cara pandang masyarakat Kota Pariaman jauh relatif baik dibandingkan Kota Padang Panjang dan Sawahlunto yang relatif jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Namun pada pelaksanaan Pemilu Kada di Kota Pariaman, partisipasi politik masyarakat relatif terbilang rendah. Pada Pemilu Kada tahun 2013 tercatat bahwa 31,4% pemilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih adalah 61.077 orang namun yang memberikan suara hanya 41.885 orang, dengan jumlah suara sah 41.301 dan 586 suara tidak sah. Kemudian pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018, pemilih yang tidak berpartisipasi 26,45 % dari jumlah DPT sebanyak 59.245 orang namun yang memberi suara 44.377 orang. Dengan suara sah 43.935 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 442 suara.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Pariaman tahun 2008-2018

Tahun Pilkada	Terdaftar	Suara Sah	Tidak memilih + suara tidak sah	Persentase Jumlah Suara
2008	52.026	38.440	13.586	73,88
2013	61.077	41.301	19.190	68,6
2018	59.245	43.935	14.868	73,55

Sumber: KPUD Kota Pariaman tahun 2019

Seperti pernyataan Ketua KPU Kota Pariaman bapak Boedi Satria yang dikutip pada harian Antara Sumbar New pada websitenya www.antasumbarnews.com yang terbit tanggal 8 September 2017 yang di akses pada tanggal 3 Oktober 2019 pada pukul 14:50 WIB bahwa;

“.....Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada 2013, terangnya relatif minimnya partisipasi pemilih disebabkan beberapa hal di antaranya para perantau yang terdata sebagai pemilih namun tidak berada di Kota Pariaman sekitar 15 persen. Kemudian para pelajar atau mahasiswa yang saat pemilihan berlangsung sedang menyelesaikan studi di berbagai daerah mencapai angka lima hingga 10 persen dan sebagian kecil dari kalangan para nelayan’ kata Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, di Pariaman, Jumat..... ”

Berdasarkan berita di atas menyatakan bahwa Kota Pariaman memiliki partisipasi yang relatif rendah di karenakan kurangnya peduli masyarakat terhadap pilkada serta tidak mengetahui betapa pentingnya pemimpin yang akan memimpin.

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Kota Pariaman tahun 2018

Tahun Pilkada	Pemilih Pemula yang terdaftar Terdaftar	Suara Sah	Tidak memilih	Persentase Jumlah Suara	Persentase jumlah suara yang tidak memilih
2018	717	144	573	20%	80%

Sumber: KPUD Kota Pariaman tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Kota Pariaman pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018 relatif rendah. Adapun permasalahan berikutnya berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMA 1 Kota Pariaman, Arif Putra Finanda pada hari kamis 15 Agustus 2019 pukul 14.22 mengatakan “Saya memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota itu atas suruhan dari Ayah dan Ibu saya, saya tidak tau paslon yang mana memiliki kualitas terbaik, jadi hanya mengikuti pilihan orang tua saja”.

Kemudian wawancara dengan saudara rexy elnando, pada hari kamis 15 agustus 2019 pukul 15.00 mengatakan “saya asli pariaman namun kuliah di Padang, jadi tidak terlalu mengikuti kali lah pilkada di Pariaman ini. Sehingga waktu pemilihan kemarin ngikut orang tua aja” . alrafni dan Suryanef (Alrafni, 1999) menyatakan “pemahaman politik relatif superfisial menyebabkan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan mobilisasi bagi kepentingannya memenangkan pemilu” Pemahaman politik bagi remaja selaku pemilih pemula relatif sangat awam sekali sehingga para pemilih pemula ini bisa dengan mudah di pengaruhi oleh lingkungannya.

Pemahaman politik bagi remaja di Kota Pariaman terbilang relative rendah. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Widya Hasan, S.Sos selaku staff pengelolaan rumah pintar pemilu KPU Kota Pariaman “Masyarakat di sini masih belum banyak menggunakan fasilitas yang kami sediakan terutama para remaja yang masih sekolah, mereka sangat minim sekali pengetahuan tentang politik dan terbukti rumah pintar pemilu KPU Kota Pariaman sepi pengunjung dari kalangan pelajar”

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul : **Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan adanya beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Relatif kurangnya pemahaman tentang Literasi Politik

2. Relatif tingginya persentase tidak memilih (angka golput) dalam Pemilu Kada Kota Pariaman 2018
3. Adanya remaja atau pemilih pemula yang apatis terhadap politik.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga . Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu “Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018”.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat

1. Berapa persen pemilih pemula yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018?
2. Pengaruh Signifikan Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah persentase pemilih pemula yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui terdapat Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Sumatera Barat

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang terkait Ilmu Administrasi Negara terutama berkaitan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam melihat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik terhadap Pemilu kada di Kota Pariaman.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Literasi Politik

Bernard Crick (Putri, 2017) Literasi Politik adalah Upaya menginterpretasikan konsepsi politik dari hal hal kecil seperti isu isu politik, keyakinan para kontestan, serta bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain, secara sempitnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik. Menurut Denver dan Hands dalam Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga Negara.

Melek politik atau Literasi Politik menurut Jenni S Bev, literasi politik mengacu kepada seperangkat ketrampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, melek politik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu melek prosedural dan melek substansial. Melek prosedural antara lain memahami regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan memahami komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Melek substansial antara lain memahami esensi pemilu dalam demokrasi, memahami urgensi partisipasi politik,

memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam pemberian suara.(Rosalia, 2016).

Dari berbagai pengertian mengenai Literasi Politik dapat di simpulkan bahwa Literasi politik adalah sebuah upaya pemberian pemahaman tentang Politik kepada masyarakat agar mampu mengikuti kegiatan politik. Literasi Politik juga merupakan upaya mengimpretasikan pengetahuan atau wawasan mengenai politik dan isu – isu politik di kehidupan sehari hari agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai politik, partisipasi politik dan hal – hal yang mengenai politik sehingga masyarakat bisa memilih keadaan politik sesuai dengan pemahamannya.

Adapun Pendekatan mengenai literasi politik warga dikemukakan Bakti (Putri, 2015) yaitu:

- a. Kebutuhan terhadap informasi politik, terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang partai politik dan kandidat (pendidikan formal, karier, keluarga, visi misi, dll)
- b. Menetapkan strategi pencarian, merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye, tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye, dll
- c. Gerakan mengkomunikasikan informasi, terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat asosiasi yang kuat untuk mengawasi pemilu sekaligus sebagai kekuatan

penyeimbang. Misal meliputi janji kampanye sehingga dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut

- d. Mengevaluasi produk dari proses akhir politik, terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/Pemilu. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak

Literasi politik dijelaskan oleh Jenni S Bev dalam (Putri, 2017) sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adapun muatan pokok literasi politik adalah:

1.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik warga dapat dibedakan atas beberapa kategori:

- a. Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif dan pasif. Dikatakan aktif, Apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam perumusan kebijakan Pemerintah, dll. Sementara partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap keputusan pemerintah
- b. Dilihat dari tingkatannya, dibedakan menjadi apatis, spektator dan gladiator. Yang pertama artinya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan Politik dan bersikap masa bodoh. Spektator maksudnya adalah warga yang Bersangkutan terlibat atau ikut memilih dalam Pemilu. Sedangkan gladiator berpartisipasi secara aktif dalam proses politik

- c. Partisipasi dibedakan atas jumlah ada yang bersifat kolektif dan lainnya individual
- d. Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif; partisipasi apatis (ada kepercayaan kepada politik namun kurang percaya pada system yang ada); partisipasi militan radikal (kepercayaan kepada politik tinggi namun percaya kepada system rendah); partisipasi tidak aktif (kesadaran politik rendah, tetapi percaya kepada system politik sangat tinggi).

1.2 Pemahaman Kritis Warga atas hal hal pokok Terkait Politik

Hal ini terkait dengan pemahaman warga mengenai politik dan aspek aspek yang berhubungan dengan politik itu sendiri. Konsep Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan alokasi merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik

- a. Kebutuhan terhadap informasi politik, terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang partai politik dan kandidat (pendidikan formal, karier, keluarga, visi misi,dll)
- b. Menetapkan strategi pencarian, merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye, tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye, dll
- c. Gerakan mengkomunikasikan informasi, terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat

asosiasi yang kuat untuk mengawasi Pemilu sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang. Misal meliputi janji kampanye sehingga dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut

- d. Mengevaluasi produk dari proses akhir politik, terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/ Pemilu Kada. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.

Dikutip (Sutisna, 2017) Literasi politik adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Mudhok menawarkan setidaknya 4 (empat) elemen literasi politik. Yaitu :

- a. Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan, dan perannya;
- b. Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik;
- c. Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan ublik;
- d. Partisipasi dalam kegiatan politik.

2. Partisipasi Politik

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Sitepu Partipasi Politik (Wardhani Nur, 2018) adalah Aktivitas dari seorang warga Negara atau kelompok masyarakat secara tidak langsung mengenai kebijakan pemerintah dilakukan oleh

individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi juga dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau masyarakat dalam keikutsertaan baik secara aktif dalam dunia politik dengan cara ikut memilih calon pemimpin negara yang baik secara langsung dan tidak langsung serta bisa mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

Menurut Verba dan Nie (Putri, 2017) mendefinisikan partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga Negara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan atau aksi yang mereka ambil”

Dikutip (Cucu, 2017) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Gaventa dan Valderama (Sahid, 2015) menyatakan bahwa “partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik dan negara”. Interaksi tersebut meliputi tindakan individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan kegiatan politik seperti kampanye, protes, atau pemungutan suara. Herbert McClosky (Budiarjo, 2012) mengartikan bahwa partisipasi

politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Budiarjo, 2012) menjelaskan arti partisipasi politik secara luas yakni:

“...Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif...”

Kemudian Damsar dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik (Damsar, 2012) mengatakan bahwa partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan (*power*), otoritas (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi (*conflict and resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), distribusi (*distribution*) ataupun alokasi (*allocation*).

Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:68).

Dari berbagai definisi mengenai partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas masyarakat yang mengikuti proses politik dan kebijakannya. Adapun bentuk politik yang dilakukan berupa kontrol terhadap politik yang dijalankan oleh pemerintah dan memberikan hak berpendapat terhadap kebijakan yang dibuat. Partipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi tujuan utama dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Partisipasi politik mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, Kamarudin Sahid dalam bukunya Memahami Sosiologi Politik (Sahid, 2015) menjelaskan fungsi partisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong program – program pemerintah.
- b. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan.

Weimar dalam (Sahid, 2015) mengemukakan terdapat lima faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni sebagai berikut;

- Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi.
- Terjadinya perubahan struktur kelas esensial. Semakin berkembangnya industrialisasi berpengaruh pada munculnya kelas baru seperti kelas menengah atau pekerja baru yang tentu memiliki kebutuhan atau tuntutan baru yang semakin meluas dan pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Pengaruh meningkatnya kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, ide – ide nasionalisme, liberalisme, dan ide lainnya yang menuntut partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- Adanya konflik di antara pemimpin – pemimpin politik. Pemimpin – pemimpin politik saling berkompetisi dalam merebut kekuasaan sehingga adanya mobilisasi partisipasi politik.
- Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Menurut Nimmo (Miaz, 2012) bahwa keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut ini:

- a. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung oleh kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh negara.
- b. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dan lain - lain.
- c. Motivasi personal, artinya motif ini mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik telah dibagi dalam berbagai macam bentuk, seperti yang dirumuskan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson (Damsar, 2012) mengemukakan tingkatan partisipasi politik. Menurut Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang,

maka semakin sedikit kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Piramida dibagi dalam empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivistis, merupakan seseorang yang intensitas dan keterlibatan dalam aktivitas politiknya tinggi. Adapun yang termasuk dalam kelompok aktivis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan, serta anggota partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*full time*). Selain itu kegiatan politik yang menyimpang seperti pembunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik juga termasuk dalam kelompok ini.
- b. Partisipan, kelompok ini mencakup berbagai aktivitas seperti petugas juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau kepentingan.
- c. Pengamat, kelompok ini adalah mereka yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensi dan jarang melakukan aktivitas politik.
- d. Orang yang apolitis, merupakan lapisan kelompok yang terbawah yaitu kelompok yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Huntington, 1994) membedakan jenis – jenis perilaku partisipasi politik sebagai berikut.

- a. *Kegiatan pemilihan* mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan – sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah dan pemimpin – pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan – persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. *Kegiatan organisasi* menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri, sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi itu untuk mempengaruhi pemerintah.
- d. *Mencari koneksi (contacting)* merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. *Tindak kekerasan (violence)* juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri; artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang – orang atau harta benda.

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson (Suryadi, 2007) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian di kenal dengan nama "Piramida Partisipasi Politik". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah

Gambar. 2.1 Piramida partisipasi politik



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syarbaini, 2002:70.

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis (Syarbaini, 2002). Kelompok yang berada di atas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan. Kelompok terakhir yang terletak dibagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis, warga yang termasuk kelompok aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok aktivis terdiri dari pejabat partai sepenuh waktu, dan pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Syarif (Syarif, 2016) menyatakan pengertian partisipasi politik menurut beberapa ahli ialah kegiatan, tindakan, dan perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk ikut serta berkecimpun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam urusan politik, baik dalam pemilihan umum, serta dalam memengaruhi proses dan pembentukan kebijakan umum suatu negara.

2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik tampak dalam aktivitas-aktifitas politiknya.

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara (Maran, 2001:148)

Terdapat beberapa bentuk partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, telah menemukan dan meneliti bahwa ada tiga indikator partisipasi politik pemilih dalam Pilkada yakni;

a. Mengikuti diskusi politik

Diskusi politik maksudnya adalah sebuah diskusi yang diikuti oleh beberapa orang dengan maksud membicarakan politik baik itu pandangan politik, ideologi ataupun pilihan politik melalui pertukaran pikiran dan argumen. Dalam *paper* (Levinsen & Yndigegn, 2015) menyebutkan bahwa:

“...diskusi meningkatkan kemampuan individu untuk mengklarifikasi sikap mereka terhadap orang lain, mendengarkan pandangan politik orang lain hingga sampai pada wawasan baru dan kemungkinan diikuti dengan keputusan (*discussion develops' individual ability to clarify their own attitudes towards other, listen to others' political views and arrive at new insights and perhaps joint decisions*)...”

Diskusi politik memungkinkan seseorang memberikan informasi politik terhadap pihak lain sehingga dengan pertukaran informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik seseorang.

b. Mengikuti kampanye

Kampanye adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih dalam konteks pemilihan umum. Usaha ini dilakukan umumnya oleh perorangan atau sekelompok orang dengan terorganisir melalui penyebaran informasi baik melalui pembicaraan, penyiaran, slogan atau spanduk dan lain sebagainya. (Kurniawan, 2013) mengartikan bahwa kampanye adalah proses interaksi yang bersifat intensif dari partai politik kepada publik dengan kurun waktu tertentu biasanya terjadi menjelang pemilu. Jadi dalam proses kampanye ini, pihak partai politik atau calon pemimpin yang ikut dalam pemilu melakukan promosi atas kebijakan yang akan diambilnya setelah terpilih kemudian masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya.

c. Menggunakan hak pilih

Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau dalam bahasa Inggris disebut *voting* adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik dalam bentuk ikut memberikan suara (menggunakan hak pilih) menurut David F Roth dan Frank L. Wilson (Budiarjo, 2012) tergolong pada kategori '*onlookers*' (penonton) yang merupakan kategori tingkat kedua setelah kategori '*apoliticals*' (apatis) dalam lima tingkatan partisipasi politik. Voting merupakan hal yang

penting di mana keputusan politik masyarakat dalam pemilihan umum berpengaruh pada proses pemerintahan maupun kebijakan.

3. Pemilih Pemula

3.1 Pengertian Pemilih

Dalam (PKPU No. 11 Tahun 2018.) tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 1 ayat 28 menjelaskan bahwa : Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”

Dalam (Undang-undang No. 10 Tahun 2008, n.d.) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20) dijelaskan bahwa :

“...Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang undang pemilu...”

Primandha Sukma Nur dan Wardhani (Wardhani Nur, 2018) menyatakan Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti

lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya.

4. Pengaruh Literasi Politik terhadap partisipasi Politik

Literasi Politik dari yang telah kita pahami secara bersama adalah proses pemahaman tentang proses dan isu-isu politik serta menjadi suara proses pemahaman dan pengetahuan kepada warga Negara yang harus melaksanakan perannya sebagai partisipasi politik yang harus paham mengenai pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik (Putri, 2017)

“...Di antara aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu adalah Tingkat melek politik masyarakat. Melek politik upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk mengenai Pemilu...”

Berikut terdapat berbagai macam keterlibatan Literasi Politik contohnya memberikan pemahaman tentang politik, pengetahuan tentang politik dan memahami isu isu politik. Sehingga aktifitas mengenai politik dan sistem politik yang ada di Indonesia dapat di ikuti dengan baik jika memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang politik. Maka dari itu sangat dibutuhkan Literasi politik untuk semua lapisan terutama para pemilih pemula yang baru tahu tentang politik.

5. Indikator Literasi Politik

Untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang memilih manusia sebagai objeknya harus memiliki atau di dasarkan dengan konsep perencanaan yang baik dan di akui sehingga pekerjaan tersebut bisa digunakan nantiya. Sama halnya dengan pada konteks Literasi Politik juga didasari oleh beberapa teori yang relevan. Penelitian sebelumnya tentang Literasi Politik telah dilakukan oleh banyak peneliti, seperti Nora Eka Putri (Putri, 2017) dalam jurnalnya tentang Dampak Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilu menggunakan indikator Literasi Politik di antaranya Kebutuhan terhadap informasi politik, strategi pencarian, gerakan mengkomunikasikan informasi.

a. Kebutuhan terhadap informasi politik,

Maksudnya terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang partai politik dan kandidat (pendidikan formal, karier, keluarga, visi misi,dll)

b. Menetapkan strategi pencarian,

Merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye, tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye, dll

c. Gerakan mengkomunikasikan informasi,

Terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat asosiasi yang kuat untuk mengawasi Pemilu sekaligus

sebagai kekuatan penyeimbang. Misal meliputi janji kampanye sehingga dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut.

d. Mengevaluasi produk dari proses akhir politik,

Terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/ Pemilu Kada. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.

6. Pemilihan Kepala Daerah

Pada masa Suharto , Demokrasi di Indonesia masih bisa dikatakan tidak terbuka dimana para pemimpin daerah yaitu kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa ini kepala daerah yang dipilih oleh DPRD lalu di sahkan oleh Presiden. Kepala daerah merupakan perpanjangan tangan dari Presiden dan meteri dalam negeri dalam mengelolah pemerintahan dan jua Kepala daerah yang di pilih oleh DPRD tidak bisa mewakili seluruh aspirasi rakyat karena DPRD bukanlah representasi dari rakyat daerah untuk memilih kepala daerah. Jika sistem masih seperti ini kesejahteraan masih belum bisa di wujudkan karena masih di kelolah oleh pemerintah pusat.

Kemudian masyarakat Indonesia menuntut adanya reformasi dan berakhir dengan kejatuhan rezim orde baru yang kemudian melahirkan perubahan atas undang – undang pemerintahan daerah yakni dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Perubahan signifikan dimulai dari Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kekuasaan otonomi

daerah seluas – luasnya yang melatar belakangi adanya hak dan kebebasan masyarakat daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang – undang No. 1 tahun 2015. Selanjutnya ditetapkan Undang – undang No. 8 Tahun 2015 yang memuat tentang perubahan atas Undang – undang No. 1 tahun 2015, yang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa;

“... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis...”

Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah pemilihan kepala daerah yang di singkat Pilada merupakan media pemilihan pemimpin oleh masyarakat dalam suatu wilayah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta demokratis. Semenjak tahun 2015 mulai diberlakukan sistem Pilkada serentak. Pilkada serentak dilakukan berdasarkan Undang – undang No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang No. 1 tahun 2015 yakni pada pasal 3 yang berbunyi “...pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...”. Sehingga pada pilkada serentak ketiga yakni pada tahun 2018 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

No. 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018.

Dalam hal ini Kota Pariaman ikut terdaftar pada daerah yang mengikuti pilkada serentak. Dengan adanya Pilkada diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik ini sehingga setiap daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Partisipasi yang dimaksud adalah ikut memilih di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya. Sehingga akan menghasilkan pemerintah yang merupakan representasi dari daerah itu sendiri dan masyarakat dapat menilai pemimpin daerah yang baik menurutnya.

B. Studi Relevan

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti, antara lain :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian yang relevan

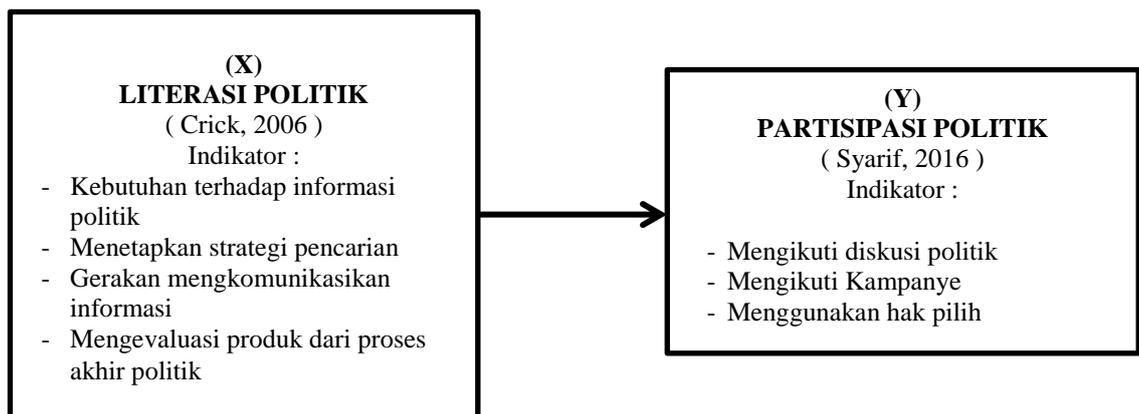
NO	Nama/ Judul Penelitian	Dimensi	Metode yang digunakan	Hasil
1	Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Nora Eka Putri)	Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik	Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif	Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat melek politik dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Solok
2	Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan	Melek Politik terhadap Partisipasi Politik	Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pemahaman politik perempuan masih superfisial dan tidak terlalu dalam maka

	dalam Pemilu 1999 di Kota Padang (Alrafni dan Suryanef)			derajat identifikasi kepartaian dari perempuan umumnya lemah dan juga dalam hal memberikan dukungannya. Seiring dengan itu kondisi tersebut akan mudah dimanfaatkan oleh sementara pihak untuk memobilisasi kepentingannya memenangkan pemilu. Jadi, penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada pentingnya pemahaman politik dan identifikasi kepartaian perempuan dalam pemilu
3	Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Kada Tahun 2018	Strategi Komunikasi dalam meningkatkan Partisipasi	Peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Padang sudah terlaksana secara optimal, walaupun masih adanya ditemukannya kendala-kendala dalam melaksanakan strategi komunikasi. Namun itu tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang karena dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, ternyata cukup efektif terlihat dari meningkatkannya partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah 2018 yaitu meningkat sebesar 11% dari tahun sebelumnya

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel – variabel yang diteliti. Secara sederhana kerangka konseptual pada penelitian mengenai Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₀ : Tidak terdapat pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018
- H_a : Terdapat pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pertama, Tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu kada Kota Pariaman tahun 2018 yaitu sebesar 20% dari jumlah pemilih pemula yang terdaftar di KPU Kota Pariaman

Kedua, literasi politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula terkhusus literasi politik yang melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi baik secara elektronik, media cetak maupun online. Sementara literasi politik yang dilakukan secara konvensional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilih pemula. Bahwa hari ini pemilih pemula akan tertarik dengan politik sambil bersantai, walaupun terdapat pengaruh literasi politik melalui sekolah dan keluarga namun tidak berpengaruh signifikan karena mereka adalah generasi yang akrab dengan penggunaan media (*media literacy*) sehingga penggunaan *gadget/tablet* lebih sering digunakan dibandingkan harus menerima informasi secara serius atau terpaku dari ibu/bapak guru dalam memberikan informasi politik yang membuatnya bosan dan stress. hal terbukti dengan pertanyaan terbuka kepada responden.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka melalui penelitian ini dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Pariaman dan Bawaslu Kota Pariaman termasuk Partai Politik sebagai salah satu institusi yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkhusus pemilih pemula untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi tentang pemilu.
2. Peneliti menyarankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat baik dalam menghadapi new normal di Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.
3. Peneliti masih menyadari bahwa hasil penelitian ini masih mengandung sesuatu yang belum diteliti dalam penelitian ini, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini. Selain itu juga disarankan mencoba menggunakan *mix method research* agar mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat, objektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adnan, M. F. (2012). *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Press.
- Alrafni, S. (1999). *Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. (1996), 23–35.
- Sofyan Siregar, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Miaz, P. (2012). *Partisipasi Politik (Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi)*. Padang: UNP Press.
- Sahid, K. (2015). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo, ed.). Bandung: CV. ALFABETA.
- Suryadi, B. (2007). *Sosiologi Politik, Sejarah, Definidi, dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Budiarjo. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV. Prima Grafika.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hendriyadi, S. d. (2016). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Huntington, J. N. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Syarbaini. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sumber Jurnal:

- Kurniawan, R. C. (2013). Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Pringsewu 2011 (Studi Pada Siswa/i SMUN di Kabupaten Pringsewu). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Cucu, S. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2).
Retrieved from <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Levinsen, K., & Yndigegn, C. (2015). Political discussions with family and friends:

Exploring the impact of political distance. *Sociological Review*, 63(S2), 72–91.
<https://doi.org/10.1111/1467-954X.12263>

Putri, N. E. (2015). Peningkatan Literasi Politik Melalui Kebijakan Berbasis Gender Di Kabupaten Solok. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 5(1), 77.
<https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.115>

Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu. 5, 1–115.

Sutisna, A. (2017). Peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*.

Syarif, M. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 4(4), 547–561.
Retrieved from <https://goo.gl/YZtaVE>

Wardhani Nur, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Sumber Dokumen lain:

Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang NO. 8 Tahun 2015. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

PKPU No. 11 Tahun 2018. Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.